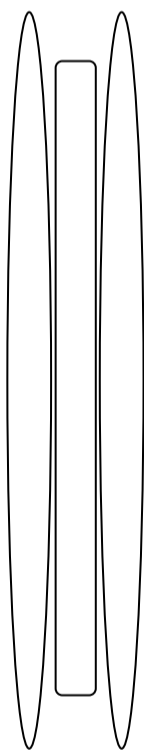




PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Pahlawan No. 52 Telepon (0525) 21281 Fax. (0525) 21451 Email: disdagkopdanukmbarsel@gmail.com Kode Pos 73711
BUNTOK

RENCANA KERJA TAHUNAN



TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena Berkat Rahmat dan Kasih Nya, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) untuk Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 yang telah di tetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perencanaan Kinerja ini berisikan kebijakan dan strategik serta rencana program dan kegiatan indikatif beserta indikator dan tolak ukur sasaran kinerja (*output*) maupun hasil (*outcome*) sekaligus indikasi yang ingin dicapai oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan pada tahun anggaran 2023 dan akan dievaluasi tingkat pencapaiannya pada setiap triwulan serta di pertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaannya pada akhir tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP).

Kami ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang terlibat dalam penyusunan perencanaan kinerja ini dengan harapan semoga pengelolaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan akan lebih akuntabel, transparan dan mendapat sambutan positif dari semua pihak yang terlibat dalam Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi Usaha kecil dan Menengah.

Buntok, Januari 2023

Kepada Dinas
Perdagangan, Koperasi – UKM
Kabupaten Barito Selatan,



SWITA MINARSIH, SE
Pembina TK. I
NIP. 19670630 199203 2 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 VISI dan MISI	
1.4 Sistematika Penyusunan	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI -UKM KABUPATEN BARITO SELATAN Tahun 2022	
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDAGKOP -UKM Tahun 2022	6
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI	14
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023	15
BAB V PENUTUP	17

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang di bentuk berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan serta memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi satuan kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan, berdasarkan Perda Nomor 44 Tahun 2022, tanggal 07 November 2022 .

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 44 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2022, tanggal 07 November 2022 .tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perdagangan.
4. Bidang Industri
5. Bidang Koperasi dan UKM
6. UPTD Pasar Beringin Buntok
7. UPTD Kemetrolagian Legal
8. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sekretariat membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Bidang Industri membawahi Jabatan Fungsional :
 - Pengawas Industri
 - Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri
 - Pramu Kebersihan
3. Bidang Perdagangan membawahi Jabatan Fungsional :
 - Pengelola Pasar
 - Pengelola Fasilitas dan Mediasi Perlindungan Konsumen
 - Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 - Pramu Kebersihan
4. Bidang Koperasi dan UKM, membawahi Jabatan Fungsional:
 - Pengadministrasi Izin Usaha
 - Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha
 - Pengelola Permodalan Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah
 - Pramu Kebersihan
5. UPTD Pasar Beringin Buntok terdiri dari :
 - Kepala UPTD
 - Sub. Bagian Tata Usaha
6. UPTD Kemetrolagian Legal
 - Kepala UPTD
 - Sub. Bagian Tata Usaha
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan .

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Materi Dalam Negri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan serta memperhatikan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyebaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.
9. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan berpedoman pada permendagri nomor : 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor : 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah .
10. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD.

1.3 VISI dan MISI

Sebagai landasan berpikir untuk meningkatkan taraf hidup Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah lingkup Kabupaten Barito Selatan serta menetapkan arah tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2023-2026) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

A. VISI

Dengan melihat perkembangan kemajuan yang telah dicapai pada Periode 2011 – 2016 serta mengacu pada visi dan misi Bupati / wakil Bupati Terpilih untuk masa bakti 2017 – 2022 dengan visi “ ***Terwujudnya Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang Mandiri sebagai Motor Penggerak Ekonomi Menuju Masyarakat Dahani Dahanai Tuntung Tulus***”

Dahani Dahanai Tuntung Tulus mengandung makna Selamat Sentosa, Adil dan Makmur Sampai Selama-lamanya

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas maka keinginan dan tekad serta komitmen itu dijabarkan seperti dibawah ini :

1. **Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Barito Selatan yang didukung oleh Sarana dan Prasarana Memadai .**
2. **Menumbuhkembangkan Industri Kecil dan Menengah yang Kompetitif**
3. **Mengembangkan Perdagangan, baik Barang maupun Jasa sehingga Menjadi Tulang Punggung Perekonomian Kabupaten Barito Selatan**
4. **Meningkatkan Promosi dan Perlindungan Konsumen, agar Produk UMKM Kabupaten Barito Selatan Semakin dikenal**
5. **Meningkatkan Kemandirian Koperasi, Kesehatan Organisasi, Serta Meningkatkan Usaha**

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan yang dilaksanakan selama tahun 2023.

- a. .KATA PENGANTAR
- b. DAFTAR ISI
- c. PENDAHULUAN
 - o Latar Belakang
 - o Landasan Hukum
 - o VISI dan MISI
 - o Sistematika Penulisan
- d. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BARITO SELATAN
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDAGKOP-UKM Tahun 2022
- e. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
- f. PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023
- g. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI - UKM KABUPATEN BARITO SELATAN Tahun 2022 .

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDAGKOP -UKM Tahun 2022

Ringkasan Anggaran Belanja TA.2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN	2.050.000.000	2.050.000.000		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.050.000.000	2.050.000.000		
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.030.000.000	2.030.000.000		
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.000.000	20.000.000		
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	6.755.366.986	8.757.789.717	(302.972.683)	(7,68)
5.1.1	Belanja Pegawai	3.668.850.856	3.635.323.587	(302.972.683)	(7,70)
5.1.4	Belanja Barang dan Jasa	3.061.516.130	5.097.466.130	0	0
5.1.4	Belanja Hibah	25.000.000	25.000.000	0	0
	BELANJA MODAL				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.013.100	59.013.100		
5.2	BELANJA TRANSFER				
5.2.1	Belanja Bantuan Keuangan	25.000.000	0	(25.000.000)	(100)

Anggaran Belanja Berdasarkan Program & Kegiatan TA.2022

Kode Rekening/ Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran		Bertambah/Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)
5	BELANJA	7.378.914.745	6.650.269.308	(728.645.437,00)
5.1	BELANJA PEGAWAI	3.633.490.856	3.599.113.587	(Rp34.377.269)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok	2.093.796.432	1.949.072.220	(Rp144.724.212)
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	223.411.396	204.504.492	(Rp18.906.904)
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	201.141.500	204.840.000	Rp3.698.500
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		15.120.000	15.120.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	52.161.200	48.510.000	(Rp3.651.200)
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	119.962.254	111.888.900	(Rp8.073.354)
5.1.1.01.07	Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus	13.573.800	7.571.100	(Rp6.002.700)
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	78.360	1.606.876	Rp1.528.515
5.1.1.02.08	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	929.365.914	1.056.000.000	Rp126.634.086
5.1.1.4	Belanja Hibah	25.000.000	25.000.000	0

5.2	BELANJA LANGSUNG	3.431.710.000,00	3.006.037.246,00	(425.672.7540)
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	143.800.000	123.400.000	(20.400.000)
5.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)
2.17.01.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.412.000	0	(36.412.000)
5.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.000.000,00	263.665.246,00	168.665.246,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.847.000	93.280.000	26.433.000
5.2.06.02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.849.070	58.982.290	20.133.220
5.2.06.05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000	7.500.000	0
5.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.230.000	530.933.000	273.703.000
5.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.300.000,00	566.150.000,00	(11.150.000,00)
5.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	69.100.000,00	58.600.000,00	(10.500.000,00)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.066.000	13.066.000	0
5.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.117.200.000	1.102.200.000	(15.000.000)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.402.100	97.306.100	11.904.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.800.000	24.800.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.777.100	53.777.100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.825.000	18.729.000	11.904.000
5.2.15	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota	135.030.500	144.655.500	9.625.000
5.2.15.06	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	14.077.500	38.702.500	24.625.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	120.953.000	105.953.000	(15.000.000)
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	243.047.900	446.353.900	203.306.000
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	243.047.900	446.353.900	203.306.000
5.2.17	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam	36.999.640	27.893.640	(9.106.000)

	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Kota			
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.999.780	26.999.780	
5.2.17.01	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.999.860	893.860	(9.106.000)
5.2.18	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 satu Daerah Kabupaten Kota	10.016.800	10.016.800	0
5.2.18.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP USP Koperasi Kewenangan Kabupaten Kota	10.016.800	10.016.800	0
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.999.800	66.496.300	16.496.500
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	49.999.800	66.496.300	16.496.500
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	67.999.880	141.873.880	73.874.000
5.2.21	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	72.499.660	137.109.860	64.610.200
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	14.999.880	14.999.880	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	12.499.800	0	(12.499.800)
5.2.21.02	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	25.000.000	102.110.000	77.110.000
5.2.21.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	19.999.980	19.999.980	0
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	49.999.920	100.000.000	50.000.080
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	49.999.920	100.000.000	50.000.080
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan	33.000.000	33.000.000	

	Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	33.000.000	33.000.000	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	84.999.860	84.999.860	0
5.2.22.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	84.999.860	84.999.860	0
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	45.000.000	45.000.000	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	45.000.000	45.000.000	
5.2.24	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	381.000.000	1.560.993.000	1.179.993.000
5.2.24.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.570.492.000,00	1.036.454.000,00	(534.038.000,00)
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	25.000.000	186.040.000	161.040.000
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	25.000.000	186.040.000	161.040.000
5.2.28	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	120.889.100	112.781.120	(8.107.980)
5.2.28.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	120.889.100	112.781.120	(8.107.980)

Indikator, Target, Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022

Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Terwujudnya Pelayanan Administrasi perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Peningkatan disiplin aparatur, Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.599.113.587	3.548.002.204	98,58
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	123.400.000	123.400.000	100

dan keuangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.280.000	93.280.000	100
		2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.982.290	58.979.450	100
		3. Fasilitas Kunjungan Tamu	7.500.000	7.500.000	100
		4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	530.933.000	529.797.544	99,79
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000000	15.000.000	100
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.807.980	67.550.347	85,72
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.066.000	13.066.000	100
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.102.200.000	1.079.050.000	97,90
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.800.000	23.699.300	95,56
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.777.100	53.777.100	100
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.729.000	18.729.000	100
Terwujudnya Bidang Industri dan Perdagangan sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Barito Selatan	Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	33.000.000	32.016.000	97,02

	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	84.999.860	83.017.708	97,67
		2. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	45.000.000	44.958.000	99,91
	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan Barang penting	1. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.560.993.000	1.554.585.000	99,59
		2. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	186.040.000	185.970.000	99,96
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	90.781.180	90.584.350	99,78
		2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	9.999.940	9.944.000	99,44
		3. Penyidikan Metrologi Legal	12.000.000	12.000.000	100
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Evaluasi terhadap Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	38.702.500	38.702.500	100
		2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	105.953.000	105.460.080	99,53
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	446.353.900	435.879.900	97,65

Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang berkualitas dengan sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.999.780	26.622.380	98,60
		2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	893.860	893.860	100
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10.016.800	9.938.800	99,22
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	66.496.300	66.496.300	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	141.873.880	141.593.366	99,80

	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	14.999.880	14.982.880	99,89
2. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		102.110.000	99.825.900	97,76	
3. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		19.999.980	19.996.780	99,98	
	PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100.000.000	99.974.000	99,97

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan menetapkan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemampuan SDM Aparatur ;
2. Mengembangkan kemampuan koperasi dan UMKM;
3. Menerapkan teknologi industri;
4. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
5. Meningkatkan perlindungan konsumen;
6. Menerapkan Administrasi dan Pelaporan tepat waktu .
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur;
8. Meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM agar memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi
9. sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelakunya;
10. Meningkatkan peran IKM dalam perekonomian masyarakat;
11. Meningkatkan promosi produk daerah ;
12. Melindungi hak – hak konsumen ;
13. Meningkatkan pengelolaan pasar.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Untuk mengoperasionalkan 13 (tiga belas) kebijakan dan strategi yang dituangkan di atas, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 telah menetapkan 13 (tiga belas) program yang dijabarkan dalam 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan indikatip tahunan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Kegiatan :

1. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Kegiatan :

1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Kegiatan :

1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Kegiatan :

1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
4. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan

1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

8. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Kegiatan :

1. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

9. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Kegiatan :

1. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

10. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Kegiatan :

1. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
2. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

11. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
3. Penyidikan Metrologi Legal

12. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

13. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Kegiatan :

1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

BAB V
PENUTUP

I. KESIMPULAN

1. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 ini adalah salah satu Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Rencana Kinerja ini berisikan *VISI* dan *MISI*, Kebijakan dan Strategi, Program dan Kegiatan yang disertai dengan indikator dan tolak ukur Kinerja bagian (*output*), indikator hasil (*outcome*), yang ingin dicapai oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan, sekaligus alokasi anggaran yang tersedia pada setiap kegiatan indikatif dalam tahun 2023.
3. Rencana Kerja ini merupakan pedoman kerja bagi Pimpinan dan Staf Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2023.
4. Hasil pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai rencana ini akan di evaluasi perkembangannya secara triwulan dan akhirnya akan dipertanggung jawabkan pada akhir tahun 2023 dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP).

II. SARAN – SARAN

1. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan semua Pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan, baik Unsur Pimpinan maupun Staf mempedomaninya, dalam setiap pelaksanaan Program dan Kegiatan indikatif serta indikator keluaran maupun indikator hasilnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
2. Rencana Kerja ini bukanlah suatu barang sakral dan mati, tetapi suatu perencanaan yang dinamis dan fleksibel. Oleh karena itu masukan yang berarti dan bermanfaat sangat kami perlukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan.

Buntok, Januari 2023

Kepada Dinas
Perdagangan, Koperasi – UKM
Kabupaten Barito Selatan,


SWITA MINARSIH, SE
Pembina TK.I
NIP. 19670630 199203 2 011

LAMPIRAN

1. DPA RENJA TAHUN 2023